

B. Saran

1. Penunjukan Notaris Pengganti sebaiknya dilakukan oleh Organisasi Notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia karena pihak organisasi tentunya lebih mengenal anggotanya, sehingga Notaris Pengganti yang ditunjuk benar-benar diketahui kemampuannya.
2. Kepada Pemerintah hendaknya menetapkan persyaratan pengangkatan Notaris Pengganti sama dengan persyaratan untuk seseorang diangkat menjadi Notaris, mengingat tugas, tanggung jawab dan kewenangan Notaris dan Notaris Pengganti adalah sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- _____. 2013. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdul Manan. 2006. *Aspek – Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Abdul kadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. 2011. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- A.Z. Nasution. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan Kedua. Jakarta: Diapit Media.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan konsumen*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- E. Sumaryono. 1995. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kanisius
- G.H.S. Lumban Tobing. 1996. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet ke-4. PT. Gelora Aksara Pratama
- Ghansham Anand. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Cet. I Jakarta: Prenada media Group
- Habib Adjie. 2007. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Telematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama
- _____. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2016. *Kompilasi Persoalan Hukum Dalam Praktik Notaris dan PPAT (Kapita Seleкта Notaris & PPAT)*. Indonesia Notary Community.

- _____.2017. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hans Kelsen. 2006.*Teori Hukum Murni*.Bandung: Nuansa dan Nusa media.
- _____. 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Heinrich Triepel. 2002. Dalam Sodjuangon Situmorang. *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota*.Disertasi. Jakarta: PPS Fisip UI
- Husni Thamrin. 2011. *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*. Yogyakarta: Pressindo.
- Indroharto. 1993.*Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan. 2009. *Ke-Notaris*.Jakarta: Raih Asa Sukses
- Jimmy Asshidiqie dan Ali Safaat.2 006.*Teori Hans Kelsen tentang Hukum*.Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mahadi. 1989.*Falsafah Suatu Pengantar*.Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M.H. Tirtaamidjaya. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco
- Herbert L. Packer. 1976. *The Limits of Criminal Sanction*. Stanford California: University Press.
- Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cetakan Kesatu. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Nico. 2003. *Tanggung jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Bussines Law.
- Nurhasan Ismail. 2007. *Perkembangan Hukum pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Kerjasama Huma dan Magister Hukum UGM.
- Nuzuarlita Permata Sari Harahap. 2011. *Pemanggilan Notaris oleh Polri Berkaitan denga Akta yang Dibuatnya* .Medan: Pustaka Bangsa Press

- Peter Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Kencana
- Philipus M. Hadjon. 1994. *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.
- _____. 1998. *Penataan Hukum Administrasi*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.
- _____. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: GadjahMada University Press
- Prajudi Atmosudirdjo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sajipto Rahardjo. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- _____. 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- Salim H.S. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- SF. Marbun. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan pertama. Jakarta: CV. Rajawali
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudikmo Mertokusumo. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Bandung: CV. Alfabeta.
- _____. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. I. Yogyakarta: Liberty.

- Suherman. 2000. *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan* (Himpunan Makalah 1961-1995). Bandung: Mandar Maju.
- Syamsul Bachri. 2015. *Politik Hukum Perburuhan*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Visi Yustisia. 2016. *Konsolidasi Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jakarta: Visi Media Pustaka.

Jurnal:

- Habib Adji, dkk. 2017. *Limitation Period Responsibilities Of The Notary Based On Justice Values*. International Journal of Business, Economics and Law. Vol. 14. Issue 4 (December).
- Henny Saida Flora. 2012. *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta*. Volume XIV. Nomor 57. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Laurensius Arliman S. 2018. *Politik Hukum Kenotariatan Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya*. Jurnal Dialogia Iuridica. Volume 9 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Maranatha Bandung.
- Melinda, Tengku Erwin syahbana. 2018. *Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*. Jurnal Lentera Hukum. Universitas Jember.
- Muh. Hasrul. 2020. *Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Jurnal Legislatif. vol. 3. Juni.
- Muhammad Iksan Macora, dkk. 2019. *Position of Notary as Party Manager and Its Implications Viewed in a Legal Perspective*. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. Vol. 6, No.2.
- Wiriya Adhy Utama .Ghansham Anand. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan*

Dengan Peradilan, Jurnal Panorama Hukum. Volume 3. Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang.

Karyailmiah:

Dewa Gede Atmadja .*Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*. Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996.

Website:

Akta. diakses dari: <https://kbbi.web.id/akta>. pada Tanggal 10 Januari 2020

Anonim. *Tanggung Jawab Profesi Notaris Dalam Menjalankan Tanggung jawab Pembuatan Akta-akta Notaris*. terdapat dalam <http://tansrik.blogspot.co.id/>. diakses pada tanggal 14 September 2019

Ariy Yandillah. Sihabudin. Herlin Wijayanti. 2016. *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya*. Jurnal Hukum yang diakses dari: <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1195>. Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan. Universitas Brwawijaya

Hukum Online. 2019. *Perbuatan Hukum*. diakses dari: <https://www.hukumonline.com/>. Pada Tanggal 18 Januari 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Notaris*. diakses dari: <http://kbbi.co.id/arti-kata/notaris>. diakses pada Tanggal 08 Januari 2020

Zamrony. *“Notaris-PPAT: Kualifikasi Sama. Perlakuan Beda”*. diakses dari <http://zamrony.Wordpress.com/>. pada tanggal 10 Januari 2020

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan
Penentuan Kategori Wilayah.